

# STUDI KEBIJAKAN PENERAPAN BAHASA, BUDAYA DAN SEJRAH BEKASI SEBAGAI MUATAN LOKAL DI SEKOLAH

Oleh

**Andi Sopandi**

Dosen Program Studi Sastra Inggris

Fakultas Komunikasi, Sastra dan Bahasa Universitas Islam "45" Bekasi

## *Abstract*

*This paper discusses the implementation of language ability, culture and history as local content in schools curriculum in Bekasi. The educational development of local-content character often faces the polemics and the proper methods in implementing it. It also includes efforts to develop local content such as local history and culture of Bekasi. Therefore, it takes effort to make stages in implementing local-content curriculum systematically, starting from the problem identification, enrichment of local-content curriculum, until the mechanism of the right policy for the purpose to build generation with local and national content-character going hand in hand.*

**Keywords:** *Local-content character, educational implementation, public policy*

## **PENDAHULUAN**

Pemberlakuan otonomi daerah mulai diterapkan melalui UU nomor 22 tahun 1999 dan disempurnakan dengan UU nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah daerah, berisi tentang penyerahan sejumlah wewenang yang semula menjadi urusan pemerintah Pusat kepada pemerintah daerah termasuk didalamnya pengelolaan pendidikan.

Dengan demikian pada era otonomi kualitas pendidikan akan sangat ditentukan oleh kebijakan pemerintah daerah. Ketika pemerintah memiliki *political will* yang baik dan kuat terhadap dunia pendidikan, ada peluang yang cukup luas bahwa pendidikan di daerah yang bersangkutan akan maju, sebaliknya,

kepala daerah yang tidak memiliki visi yang baik dibidang pendidikan dapat dipastikan daerah tersebut akan mengalami stagnasi dan kemandegan menuju pemberdayaan masyarakat yang *well educated*, tidak akan pernah mendapat momentum yang baik untuk berkembang (Suyanto;2001).

Menurut Musthato: 2010 beberapa unsur yang mesti dipenuhi dalam penyelenggaraan otonomi daerah dan otonomi pendidikan yaitu diantaranya : masyarakat sebagai *stakeholder* pendidikan setempat semestinya berpartisipasi aktif dalam merumuskan kurikulum muatan lokal, yang akan membantu memberikan diagnosis kebutuhan-kebutuhan pendidikan sesuai dengan

konteks lokalitas. Selain itu memberikan perhatian terhadap

Sehingga dapat dikatakan bahwa otonomi daerah adalah peluang emas bagi pemerintah daerah untuk membangun, mengatur pendidikan sebaik dan sesuai dengan kebutuhan yang ada di daerah. Pemerintah sebagai pengambil kebijakan umum pendidikan haruslah dimulai dengan adanya *political will* yang kuat guna menjamin kualitas pendidikan. Peran ini bisa dilakukan dengan melakukan monitoring, inovasi pemberian muatan kualitas pembelajaran termasuk didalamnya muatan lokal di daerah.

Paradigma pembangunan dan modernisasi merupakan dua tautan yang beriringan dalam sebuah konsep manajemen strategis pembangunan suatu negara atau regional tertentu. Konsepsi modernisasi lama seringkali menganggap kebudayaan lokal sebagai hambatan dalam proses pembangunan digantikan konsepsi pembangunan ala Barat. Namun, kini konsep modernisasi mengalami evolusi yang cukup besar, di mana salah satu penggerak keberlanjutan pembangunan kini semakin mengedepankan aspek kebudayaan sebagai modal dasar pembangunan.

Indonesia memiliki sejumlah unsur kebudayaan dengan sejumlah 656 suku bangsa dengan keberagaman kebudayaannya. Setiap suku bangsa memiliki bahasa dan kekayaan tradisi yang berbeda-beda. Faktor geografi dan sejarah serta perkembangan masyarakat turut

anggaran dengan porsi minimal 20% dari anggaran daerah yang dimiliki.

berpengaruh terhadap timbulnya sejumlah ragam budaya dan bahasa. Keanekaragaman budaya menjadi cerminan nilai-nilai yang dianut pada masyarakat tersebut. Kekayaan budaya di atas merupakan modal sosial (*social capital*) yang cukup signifikan bagi pembangunan bangsa sebagaimana paradigma di atas.

Bekasi memiliki sejumlah keunikan sosial budaya. Kekhasan wilayah ini dapat terlihat dari segi asimilasi berbagai unsur kebudayaan, dilihat dari segi historis, geografis, demografi, dan keragaman unsur kebudayaannya. Hal inilah yang kemudian membentuk sebuah karakteristik yang khas dan unik. Oleh sebab itu, kapasitas sejarah, budaya dan bahasa inilah yang hendak patut untuk dilestarikan sebagai bagian pengembangan aset kekayaan budaya daerah dan identitas budaya serta aset pariwisata daerah.

Karakteristik lokal tersebut perlu diperkenalkan dan ditanamkan sejak dini, khususnya kepada anak-anak dan generasi seterusnya, baik pendidikan dasar, menengah, atas hingga perguruan tinggi. Penerapan nilai-nilai sejarah dan budaya melalui lembaga pendidikan secara berjenjang dan sistematis akan membuat pengenalan ini lebih efektif tidak saja pada hal-hal yang bersifat fisik yang makin lama makin hilang kekhasannya tetapi juga pada nilai-nilai yang dibangun didalamnya.

Pemerhati masalah Budaya Betawi Margani Mustar mengatakan

pada seminar Kepariwisata Betawi dalam Perspektif Etis, Estetis dan lokal yang bertahun-tahun telah dianggap sebagai nilai-nilai luhur orang-orang Betawi, tidak berlebihan rasanya jika ciri-ciri lokal tersebut ditanamkan kepada anak-anak di Jakarta sejak mereka duduk di sekolah dasar hingga perguruan tinggi.

Ia mengatakan, di sejumlah sekolah-sekolah di Indonesia sudah memasukkan muatan lokal dalam kurikulum daerah tersebut, antara lain dengan memasukkan budaya dan bahasa lokal sebagai salah satu mata pelajaran bagi peserta didik. Hal lain diperkuat oleh peraturan daerah provinsi Jawa Barat pada Perda no. 5 tahun 2003, bahwa di Jawa Barat ada tiga jenis bahasa daerah. Seperti di kabupaten / kota Bekasi mempelajari bahasa Melayu Betawi, di kabupaten / Kota Cirebon berbahasa Cirebonan, kabupaten Indramayu dengan bahasa Derma-yunya. Sedangkan BPDB Disdik Jawa barat telah memberikan kesempatan kepada daerah untuk melaksanakan dan menggunakan bahasa daerah yang diperlukan. Karena pemberian muatan lokal ini bertujuan untuk memberikan bekal penguasaan keterampilan pembentukan sikap dan perilaku siswa agar mereka memiliki wawasan yang luas dan mantap tentang keadaan lingkungan dan kebutuhan masyarakatnya sehingga siswa mampu mengembangkan dan melestarikan sumber daya lama dan kebudayaan yang mendukung pembangunan sesuai dengan karakteristiknya, dan pengajaran

Akademis", bahwa "Kesadaran terhadap "lokal genius" (identitas muatan lokal ini juga diharapkan akan mendukung program visi dan misi kota yang bersangkutan.

### **Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan rumusan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimanakah potensi penerapan muatan lokal (bahasa, sejarah dan budaya Bekasi) di sekolah ?
2. Bagaimanakah peluang dan tantangan diterapkannya kebijakan tersebut ?
3. Apa dan bagaimana strategi dan kebijakan yang dikembangkan dalam rangka penerapan muatan lokal di sekolah se- Kota Bekasi ?

### **Maksud dan Tujuan**

Kajian ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan gambaran tentang potensi peluang dan tantangan serta gambaran strategi dan kebijakan untuk dijadikannya kekayaan budaya Bekasi sebagai muatan lokal di sekolah yang selanjutnya akan dijadikan dasar/referensi dikeluarkannya Peraturan walikota Bekasi/ Perda.

Tujuan kegiatan ini adalah:

- (1) Mengidentifikasi potensi (berkaitan dengan referensi, buku, sumber bahan ajar dan analisa SDM/Skill serta aspek kognitif, affektif, dan psikomotorik) dan kebijakan penerapan muatan lokal (khususnya materi Sejarah,

Budaya dan Bahasa Dialek Bekasi) di tingkat sekolah.

- (2) Mengkaji sejauhmana tingkat peluang dan tantangan diterapkannya kebijakan tersebut
- (3) Merumuskan strategi dan kebijakan yang dikembangkan dalam rangka penerapan materi muatan lokal di lembaga pendidikan di Kota Bekasi.

## **METODE PENELITIAN**

### **Disain Penelitian**

Disain penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, dengan melakukan survei dan analisa, yang meliputi:

- a. Identifikasi kondisi pendidikan di Kota Bekasi, khususnya jenjang pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah menengah pertama.
- b. *Focus Group Discussion* (FGD) para *stakeholder* pendidikan di Kota Bekasi.
- c. Melakukan pemetaan isu dan permasalahan pendidikan di Kota Bekasi Berkaitan dengan pengembangan dan implementasi kurikulum muatan lokal.
- d. Analisa *Strength, Weakness, opportunities, threat* (SWOT) atau analisa Kecepatan (kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman), yang kemudian implementasikan dalam bentuk strategi dan kebijakan pengembangan Kurikulum muatan lokal di Kota Bekasi
- e. Rekomendasi awal untuk pengembangan kurikulum muatan lokal, baik dalam bentuk garis besar materi kurikulum muatan lokal maupun bentuk kebijakan yang dapat dilakukan dalam

mendukung pelaksanaan pengembangan muatan lokal di Kota Bekasi.

Untuk memenuhi kebutuhan analisa di atas, maka dikembangkan beberapa instrumen penelitian baik didasarkan oleh data primer maupun sekunder, maka diharapkan akan tergambar kondisi pendidikan di Kota Bekasi baik dilihat dari kuantitas, kualitas maupun pengembangan lebih lanjut bagi penerapan muatan lokal di Kota Bekasi. Dari kajian potensi tersebut kemudian dilakukan kajian eksisting dan diagnosa tingkat keselarasan dan keterpaduan (*link and match*) pendidikan dengan pengembangan muatan lokal di Kota Bekasi. Hal ini ditunjang dengan instrumen para *stakeholder* yang terkait dengan kajian (dinas pendidikan, sub dinas pendidikan dasar dan menengah, para pengawas, kepala UPTD, para Kepala Sekolah baik SD maupun SMP, tokoh masyarakat, Dewan Pendidikan Kota Bekasi dan dunia usaha/Industri serta tokoh masyarakat lainnya).

Berdasarkan pemetaan potensi dan analisa repons tersebut, maka dilakukan *Education Mapping* (Pemetaan pendidikan). Selanjutnya, dipetakan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan melalui Analisis SWOT dari beberapa komponen meliputi *Goodwill* pemerintah daerah di Kota Bekasi, sebagai berikut.

### **Analisis SWOT Sebagai Alat Formulasi Strategi**

Analisis SWOT sebagai identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perencanaan sosial. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*Strength*) dan peluang (*Opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*Weakness*) dan ancaman (*Threats*). Proses perumusan perencanaan strategis selalu berkaitan dengan pengembangan strategi dan kebijakan yang dibuat (dalam hal ini pemberdayaan masyarakat). Dengan demikian, perencana strategis (*strategic planner*) harus menganalisis faktor-faktor strategis (khususnya di masalah sosial, baik berupa kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman) dalam kondisi yang ada saat ini. Hal ini yang disebut dengan analisis situasi. Model yang paling populer untuk analisa situasi adalah analisis SWOT (Rangkuti, 1999: 18-29).

Untuk mengetahui kondisi masyarakat (aspek sosial) dapat ditentukan oleh kombinasi faktor internal dan eksternal. Kedua faktor tersebut harus dipertimbangkan dalam analisis SWOT. SWOT adalah singkatan dari lingkungan *internal strengths* dan *weaknesses* serta lingkungan eksternal *Opportunities* dan *Threats* yang dihadapi. Analisis SWOT membandingkan antara faktor eksternal peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) dengan faktor internal kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weaknesses*).

### **Model Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal di Kota Bekasi**

Studi ini berkaitan dengan kegiatan Studi Kebijakan Penerapan Bahasa, Budaya Dan Sejarah Bekasi Sebagai Muatan Lokal di Sekolah. Oleh sebab itu, pemetaan pendidikan dan pengembangan kurikulum di Kota Bekasi menjadi landasan utama dalam merumuskan langkah awal untuk menentukan mengapa perlu dilakukan suatu perubahan.

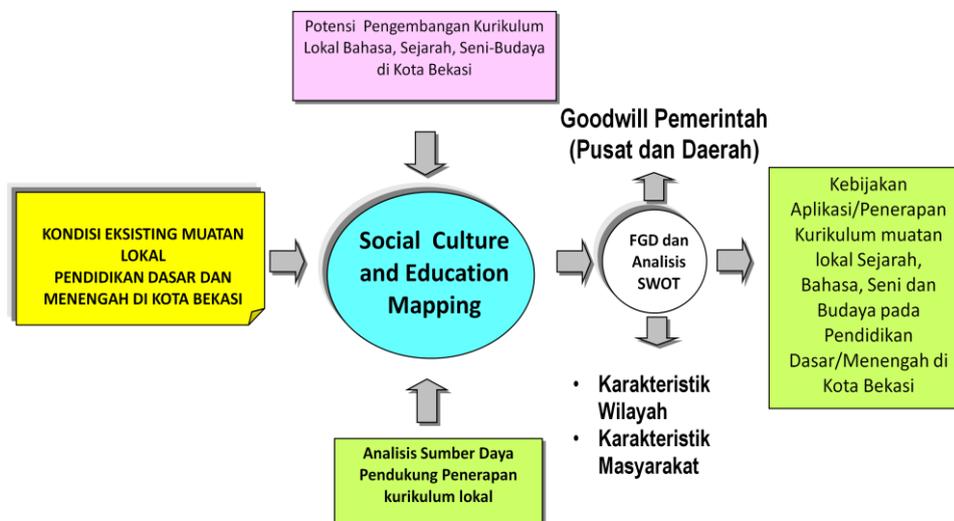
Oleh sebab itu, pendekatan kajian Studi Kebijakan Penerapan Bahasa, Budaya Dan Sejarah Bekasi Sebagai Muatan Lokal di Sekolah Kota Bekasi dilakukan dengan menentukan populasi dan mengambil sampel dengan tingkat keterwakilan dari populasi, beberapa *stakeholders* yang meliputi:

- (1) Aparat pemerintah
- (2) Lembaga Kemasyarakatan
- (3) Tokoh masyarakat, meliputi para ulama, sesepuh, praktisi seni-kebudayaan dan pendidikan
- (4) Akademisi: perguruan tinggi dan akademi.

Berdasarkan pola tersebut, maka dapat dilakukan *redesign the process* terhadap pengembangan kebijakan penerapan bahasa, budaya dan sejarah sebagai muatan lokal di Kota Bekasi. Di sisi lain juga, kemungkinan bentuk-bentuk strategi pengembangan kurikulum muatan lokal di Kota Bekasi. Berkaitan dengan mekanisme di atas, maka untuk melakukan pola studi kebijakan penerapan bahasa, budaya dan sejarah Bekasi sebagai muatan lokal di Kota Bekasi kemudian ditindaklanjuti dengan *action plan*

dengan merumuskan rencana-rencana aksi sesuai dengan tingkat kebutuhan dan pengembangan kurikulum muatan lokal di Kota Bekasi.

Gambar 1.  
Studi Kebijakan Penerapan Bahasa, Budaya dan Sejarah  
Sebagai Muatan Lokal di Kota Bekasi



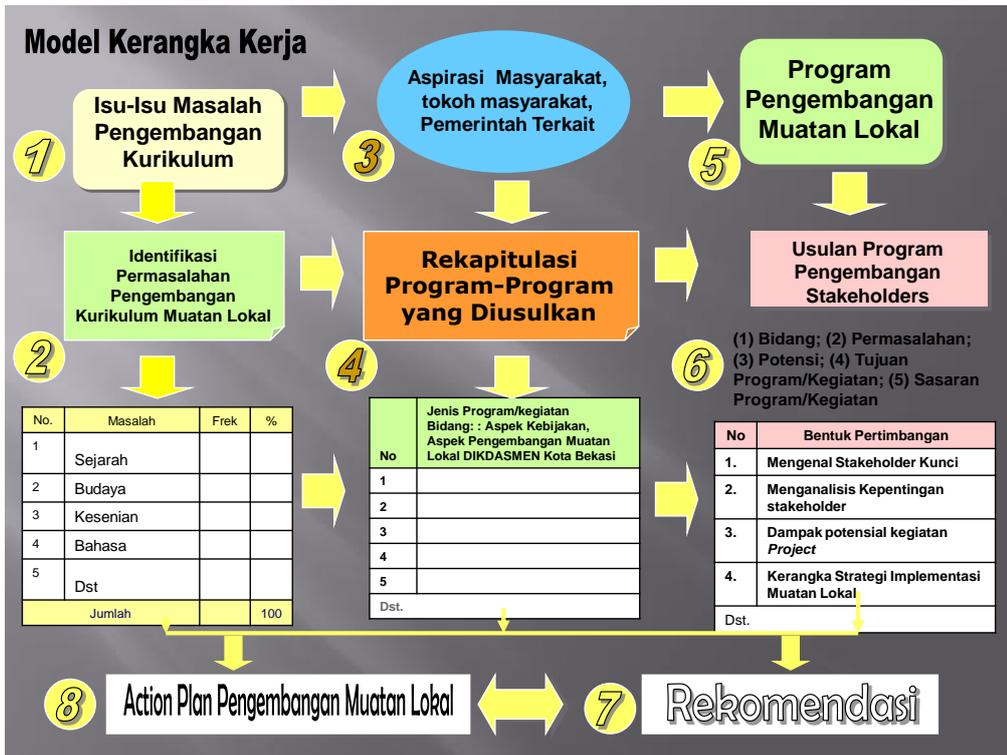
Pada gambar tersebut dideskripsikan kondisi dan posisi untuk melakukan perubahan (*Possition for Changes*) pada pendidikan menengah kejuruan di Kota Bekasi, pada tahapan berikutnya dilakukan diagnosa hasil pemetaan kondisi dan potensi pada Pendidikan Menengah Kejuruan baik Negeri dan Swasta maupun sektor dunia usaha/industri (*diagnoset the existingsp process*) hasil pemetaan tersebut kemudian dikembangkan dengan memperhatikan aspirasi dinas terkait (Dinas Pendidikan, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, BPS, Bappeda) dan *stakeholders*: Kepala Sekolah, Guru, Komite, Tokoh Masyarakat, dan Dunia Usaha/Industri untuk

membuat disain baru (*redesign thep process*). Dengan demikian melalui beberapa program tersebut diharapkan akan mengarah pada pola *Reengineering* SMKN di Kota Bekasi.

Selanjutnya dari sisi metodologis, bahasa, budaya dan sejarah banyak ditunjang oleh berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelestarian dan pengembangan muatan lokal dalam pembangunan daerah dan nasional. Tentu dengan memperhatikan kaedah-kaedah kependidikan nasional.

Dengan demikian maka yang menjadi kerangka kerja dalam penelitian ini adalah seperti dalam skema berikut :

Gambar 2.  
Skema Kerangka Kerja Penelitian



### Pendekatan Penelitian dan Pemilihan Informan

Berdasarkan metode penelitian yang digunakan di atas yaitu metode penelitian kualitatif-kuantitatif, maka prinsip dasar metode tersebut menjadi dasar penentuan *setting* penelitian. *Setting* penelitian ini sebagaimana dikemukakan Denzin Guba (dalam Agus Salim, 2001: 200) bahwa:

“Dalam penelitian kualitatif, pengambilan atau pencatatan anggota *sampling* memang tidak populer, tetapi merupakan

strategi untuk mencatat atau mengkategorisasikan fenomena yang diteliti. Secara kultural, *setting* akan berpengaruh pada perilaku individu, di mana atribut fisik sangat membatasi tindakan apa yang dilakukan seseorang. Oleh sebab itu, *setting* juga dapat diberikan karakteristik tunggal sehingga dapat setara untuk diperbandingkan. Namun ada juga *setting* yang tidak memiliki karakteristik

tunggal, maka perbedaan tersebut dapat diatributkan pada peran rumusan sosial yang digunakan dalam *setting*”.

Uraian di atas menunjukkan metode penelitian kualitatif-kuantitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan, tulisan dan perilaku yang diamati dari subyek itu sendiri dan hasil instrumen yang didapatkan dari obyek yang diteliti berdasarkan sampel dan telah ditetapkan.

Populasi penelitian adalah keseluruhan jumlah responden yang menjadi sasaran dalam penelitian. Jadi, populasi yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah seluruh komponen *stakeholder* berkaitan dengan strategi kebijakan pengembangan muatan lokal di Kota Bekasi. Hal ini sejalan dengan pendapat Sugiono (2003: 90) bahwa “populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu untuk ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Sementara itu, Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiono, 2003: 91).

Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel yang didasarkan atas tujuan tertentu pada

obyek yang mengerti dan memahami program. Pemilihan *informan* ini didasari dengan pertimbangan (a). Keahlian atau kepakaran seseorang dalam kasus yang akan didiskusikan, (b). Pengalaman praktis dan kepedulian terhadap fokus masalah, (c), “pribadi terlibat” dalam fokus masalah. (d). Tokoh otoritas terhadap kasus yang di diskusikan, (e). Masyarakat awam yang tidak tahu menahu dengan masalah tersebut, namun ikut merasakan persoalan yang sebenarnya. (Burhan Bungin, 2001).

Dari permasalahan yang ada peneliti berusaha untuk menghimpun para *informan* dari berbagai keterwakilan, untuk mendapatkan informasi dan masukan yang sebanyak-banyaknya. Bukan semata-mata berorientasi pada kebenaran informasi seseorang tetapi menjadi kebenaran intersubyektif, karena selama diskusi berlangsung masing-masing orang tidak saja memperhatikan pendapatnya sendiri tetapi mempertimbangkan apa yang dikatakkan oleh informan lainnya.

Jumlah informan ini sebanyak tiga puluh orang dan akan menjadi sumber informasi. Informan ini terdiri dari berbagai unsur masyarakat dan keterwakilan lembaga. Adapun rekapitulasi Informan Kunci (*key informan*) yang dicari seperti pada tabel berikut:

Tabel 1.  
Kategorisasi Penetapan Informan Kunci (Key Informan)  
Studi Kebijakan Penerapan Bahasa, Budaya dan Sejarah

di Kota Bekasi

No.	Kategori sasi kebutuhan data	Key Informan
1	Potensi dan kebijakan penerapan muatan lokal di sekolah	(1) Ika Sentra (2) Dewan Kesenian Bekasi (3) PB BKM Kota Bekasi (4) PB BKMB Kota Bekasi (5) Akademisi Perguruan Tinggi
2	Peluang dan tantangan diterapkannya kebijakan mulok	(6) Bagian Hukum (7) Ka. Dinas Pendidikan kota Bekasi (8) Dinas Pendidikan Kota Bekasi (9) Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Kepariwisata (10) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3	Strategi dan kebijakan mulok di sekolah se-Kota Bekasi	(11) Pendidik (Guru bahasa dan sejarah ) di tingkat SD (12) Pendidik (Guru bahasa dan sejarah ) di tingkat SMP (13) Bagian Kurikulum dinas pendidikan Kota Bekasi (14) Dinas Kesejahteraan Sosial (15) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Komisi D (16) Pengawas Pendidikan Kota Bekasi (17) MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran); sejarah, bahasa sunda, PLH tingkat SD dan SMP. (18) Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Bekasi

Berdasarkan hasil penentuan populasi di atas, maka berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK)

### Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah melalui studi lapangan yang didahului oleh survei awal lapangan dan analisa data

sampel yang dijadikan fokus utama diambil berdasarkan tingkat keterwakilan populasi yang ada.

pendidikan, berdasarkan kategorisasi di atas, meliputi:

- a. Dinas/Instansi Terkait
- b. Sekolah: Kepala Sekolah, Guru, Komite

- c. Lembaga kemasyarakatan dan tokoh seni budaya
- d. Tokoh Masyarakat dan Pemerhati Masalah Pendidikan

Beberapa metode teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, meliputi: wawancara mendalam dan *Focus Group Discussion* (FGD).

**PEMBAHASAN**

**Isu Permasalahan**

Ada beberapa isu permasalahan yang dihadapi dalam penerapan muatan lokal Bekasi, di antaranya adalah:

- 1. Penamaan muatan lokal
- 2. Mekanisme pemunculan materi muatan lokal di sekolah: (a) apakah menjadi bobot muatan

materi tersendiri; (b) atau melalui sistem pencangkokan pada materi pelajaran yang sudah ada (alternatifnya: pembobotan mata pelajaran Bahasa Sunda; Sejarah; atau PLH)

- 3. Kesiapan Sumber daya manusia (SDM) pendukung
- 4. Bahan Ajar
- 5. Sarana dan prasarana pendukung
- 6. Kebijakan
- 7. Program yang diusulkan

Analisa potensi dan isu permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan muatan lokal adalah sebagai berikut:

**Penamaan Muatan Lokal**

Berdasarkan hasil *Focus Group Discussion* (FGD), ada beberapa alternatif penamaan MP, meliputi:

Tabel 2.  
Analisa Penamaan Muatan Lokal

No.	Alternatif Penamaan Muatan Lokal	Kelebihan	Kekurangan
1.	MP Sejarah, Budaya, dan Bahasa Bekasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Secara materi, dengan penamaan ini dapat tercapai dalam PBM</li> <li>• Buku-Buku pendukung sudah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dari segi pemberian nama sejarah, akan ambigu bila dibandingkan dengan mata pelajaran sejarah umum baik tingkat SD maupun SMP</li> </ul>

		cukup banyak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah Waktu Belajar Sekolah Bertambah (resistensi penolakan sangat tinggi)</li> </ul>
2.	MP Bahasa Bekasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Materi Pembelajaran Lebih Terfokus</li> <li>• Menjadi Materi tersendiri di Sekolah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kamus dialek Bekasi sudah ada. Tetapi aplikasi teknis pengajarannya belum tersedia</li> <li>• SDM pengajar masih butuh penguatan materi kebahasaan melayu Betawi Dialek Bekasi</li> </ul>
3.	MP Budaya dan Bahasa Bekasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Materi Pembelajaran Lebih Terfokus</li> <li>• Menjadi Materi tersendiri di Sekolah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kamus dialek Bekasi sudah ada. Tetapi aplikasi teknis pengajarannya belum tersedia</li> <li>• SDM pengajar masih butuh penguatan materi kebahasaan</li> <li>• Hambatan terutama di SMP harus menambah jumlah waktu jam Mata pelajaran</li> </ul>
4.	MP Pendidikan Lingkungan dan Budaya Bekasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Untuk ditingkat SD dan SMP penamaan ini lebih baik, karena resistensi penolakannya lebih rendah.</li> <li>• Dilihat dari sisi kompetensi tenaga pengajar lebih mudah.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bila menjadi Mata pelajaran tersendiri, konsekuensi akan menambah jumlah mata pelajaran</li> <li>• Bila merubah nomenklatur PLH menjadi PLBB, harus ada komitmen yang kuat baik di tingkat Kota maupun Provinsi.</li> </ul>

### Mekanisme Pemunculan Materi Muatan Lokal Di Sekolah

Ada beberapa alternatif: (1) system pencangkokan pada mata pelajaran muatan lokal yang ada; atau (2) mata pelajaran tersendiri. Khusus di tingkat SD, tidak ada masalah, karena mata pelajaran Basa Sunda diampu oleh guru kelas (bukan berbasis kompetensi) sehingga memungkinkan langsung dikembangkan. Usulan nama mata pelajaran: Sejarah,

Budaya, dan Bahasa Bekasi. Ada beberapa alternatif: (1) system pencangkokan pada mata pelajaran muatan lokal yang ada; atau (2) mata pelajaran tersendiri.

Khusus di tingkat SMP, peluang pemunculan materi dapat diboboti pada 2 (dua) mata pelajaran muatan lokal, yaitu: (a) Basa Sunda dan (b) Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH). Pada tahap awal dapat dikembangkan terlebih dahulu:

Pendidikan Lingkungan Budaya Bekasi (PLBB) di tingkat SMP, secara bertahap dapat dikembangkan pembobotan bahasa dialek Bekasi pengganti Bahasa Sunda. (Karena Nomenklatur guru bahasa Sunda bukan harus berkompotensi Sastra/Bahasa Sunda, tetapi Guru Bahasa Daerah).

### **Kesiapan Sumber Daya Manusia Pendukung**

Manusia (SDM) dalam konteks ini di tingkat Sekolah Dasar (SD) tidak menjadi masalah karena nomenklatur pengajarnya adalah guru kelas. Hanya perlu adanya sosialisasi dan workshop guru pengajar Mata Pelajaran muatan lokal. Apabila pada tahap awal, dilaksanakan terlebih dahulu pencangkokan materi PLH menjadi PLBB, maka guru pengampu dalam mata pelajaran muatan lokal PLBB dapat dilakukan oleh Guru IPS atau IPA. Tetapi khusus tahap berikutnya pelaksanaan penerapan mata pelajaran Bahasa Dialek Bekasi, maka SDM yang dapat dikembangkan adalah Guru Bahasa Daerah (Standar Kompetensi Pengajar).

### **Sarana dan Prasarana Pendukung**

Untuk meningkatkan kualitas pengembangan dan penerapan kurikulum muatan lokal sejarah, budaya, dan bahasa Bekasi maka dibutuhkan sarana dan prasarana pendukung yang memadai. Untuk itu perlu adanya upaya untuk mengatasi sarana dan prasarana pendukung masih sangat terbatas.

### **Bahan Ajar**

Ada beberapa alternatif berkaitan dengan penerapan pengembangan materi sejarah, budaya dan bahasa di Kota Bekasi, di antaranya adalah:

- (a) Penyisipkan Materi Sejarah, Budaya, dan Bahasa pada beberapa materi yang ada di dalam materi mata pelajaran yang telah ada, di antaranya adalah Materi Sejarah, IPS, bahasa Sunda dan mata pelajaran kesenian dan kerajinan.
- (b) Sistem Pencangkokan Materi Sejarah, Budaya, dan Bahasa dengan cara merubah nama mata pelajaran, tetapi dengan nomenklatur yang tidak merubah penamaan yang telah ada.
- (c) Materi Pelajaran tersendiri, tetapi mengganti materi muatan lokal yang ada, tanpa adanya konsekuensi menambah jumlah mata pelajaran yang ada di sekolah ataupun waktu jam mata pelajaran.

Beberapa sarana dan prasarana pendukung tersebut di antaranya adalah:

- (a) Buku-buku penunjang
- (b) Referensi utama muatan lokal
- (c) Pengembangan perpustakaan daerah, baik di tingkat kota maupun tingkat kecamatan dan kelurahan.
- (d) Buku bahan ajar
- (e) CD/VCD interaktif

- (f) Pengembangan daerah kunjungan program *city tour* wisata sejarah dan budaya Bekasi sebagai bagian pendukung aplikasi pembelajaran muatan lokal di antaranya yang harus dilakukan adalah:
- 3) Panduan wisata Kota Bekasi dan sekitarnya; dengan pengembangan promosi wisata yang berkesinambungan dengan wilayah Jabodetabek, Bandung dan sekitarnya.

1) Pembenahan daerah kunjungan sejarah, seni dan budaya; meliputi: perbaikan infrastruktur bangunan wisata, sejarah-budaya dan jalan, pembuatan rute wisata sejarah dan seni-budaya, pelatihan pemandu wisata (pemberdayaan tenaga TKK/honorer, baik di tingkat kelurahan/kecamatan, maupun tingkat dinas terkait), pembuatan buku panduan wisata bagi pelajar maupun sekolah/umum, *bulletin* dan sebagainya.

2) Pembangunan museum; pendirian alternatif di gedung papak; pengadaan pengembangan dan pemberdayaan museum Bekasi, program diskusi rutin dan pengembangan perpustakaan di museum.

- b. Penambahan Tupoksi Dinas Pendidikan yang berkaitan dengan muatan lokal
- c. Pembentukan Kelompok Kerja Guru (KKG) Rumpun Mulok di tingkat SD dan MGMP PLBB (tingkat SMP), Pengembangan MGMP Bahasa daerah yang sudah. (Bahasa sunda ke Bahasa Bekasi).
- d. Peningkatan Kompetensi Guru Mulok (ada sertifikasi

### **Kebijakan**

Ada beberapa kebijakan yang diusulkan dalam *Focus Group Discussion*, meliputi:

- a. Regulasi atau peraturan pendukung dapat berbentuk Peraturan daerah (Perda) atau Peraturan Walikota (Perwal); di sisi lain diperlukan sinergitas program pendidikan untuk mendukung penerapan muatan lokal sejarah, budaya, dan bahasa Bekasi, yang didukung oleh anggaran daerah dan komitmen pemerintah. Jika Pemerintah Daerah mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap pendidikan maka pendidikannya akan maju sebaliknya jika tidak ada kepedulian terhadap kependidikan, maka program-program pendidikan dapat berjalan tersendat-sendat.
- kompetensi lokal ditanda tangani oleh Disdik dan DKB.
- e. Pemenuhan sarana dan prasarana penunjang Mulok (Bahan ajar, alat peraga, dan media).
- f. Pekan Pengembangan Budaya Pelajar Bekasi

### **Program yang Diusulkan Pelatihan Guru Mata Pelajaran Muatan Lokal**

Beberapa program yang diusulkan, di antaranya adalah:

- a. Penyusunan Buku Muatan Lokal (dengan lembaga/tenaga ahli yang kompeten)
- b. Program Pelatihan Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal (memiliki kemampuan pengembangan SAP dan Silabus).
- c. Workshop Materi Muatan Lokal Pendidikan Lingkungan Budaya Bekasi Tingkat SD dan SMP di Kota Bekasi
- d. Program Penyiapan Infrastruktur dan Suprastruktur Pendukung *City Tour* Wisata dan Budaya Bekasi; Pemandu daerah wisata budaya, museum Bekasi, Sanggar Pembina dan pendukung, *souvenir*, buku wisata yang *ter-update*.
- e. Website Wisata dan Budaya Bekasi
- f. Pengembangan program CSR dalam mendukung penerapan muatan lokal di Kota Bekasi, dengan memperhatikan aspek sinergitas *profit*, *people* dan *planet*.

#### **Analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, Threat*)**

- Penerimaan masyarakat terhadap muatan lokal Bekasi
- Kelemahan (*Weakness*)**
- Kebijakan pemerintah daerah berkaitan dengan muatan lokal sejarah, budaya dan bahasa Bekasi masih belum ada.
  - Alokasi anggaran daerah tentang muatan lokal Bekasi yang minim

Untuk merumuskan strategi kebijakan penerapan muatan lokal (Sejarah, Budaya, dan Bahasa Bekasi), maka dirumuskan kajian lingkungan internal (*strength dan weakness*) dan lingkungan eksternal (*opportunities dan threath*). Proses perumusan analisa SWOT ini didasarkan hasil *Focus Group Discussion* (FGD) yang dilakukan sebanyak dua kali, dengan mengikutsertakan beberapa *stakeholder*.

Berdasarkan uraian analisa internal eksternal di atas, maka hasil *Focus Group Discussion* (FGD) ditentukan analisa lingkungan yang paling menonjol dari sejumlah isu yang ada sebagai berikut:

#### **Kekuatan (*Strength*)**

- Dukungan Pemerintah yang cukup besar bagi pengembangan dan penerapan muatan lokal Bekasi
- Referensi dan hasil penelitian sejarah, budaya dan bahasa Bekasi sudah cukup banyak
- Dukungan masyarakat yang besar

- Belum akuratnya data dan media informasi, komunikasi sejarah, budaya dan bahasa Bekasi
- Koordinasi pemerintah dan Keterkaitan antar sektor seni budaya, sejarah dan pariwisata belum optimal.

#### **Peluang (*Opportunity*)**

- Kebijakan Pemerintah Daerah yang mendukung dalam bentuk

Visi misi dan RPJMD Kabupaten Bekasi

- Aksesibilitas yang tinggi terhadap pengembangan potensi seni budaya, sejarah dan pariwisata yang potensial
- Adanya Organisasi Pemerintah maupun non-pemerintah yang konsisten di bidang kebudayaan dan seni serta pariwisata
- Potensi peningkatan CSR bagi pengembangan seni budaya, sejarah dan pariwisata

**Ancaman (Threath)**

- Inkonsistensi kebijakan muatan lokal di bidang seni budaya, sejarah dan pariwisata di Daerah dan Nasional
- Keberpihakan pengembangan muatan lokal terhadap seni budaya sejarah dan pariwisata yang masih minim.
- Potensi resistensi penolakan terhadap muatan lokal
- *Image building* terhadap sejarah, budaya dan bahasa yang rendah

**Strategi Pengembangan Muatan Lokal**

Berdasarkan permasalahan dan Program usulan yang dimunculkan oleh beberapa Budaya, dan Bahasa) Bekasi disajikan dalam Tabel di bawah ini.

*stakeholder* di atas, maka dapat dirumuskan secara sederhana strategi penerapan muatan lokal (Sejarah, Budaya, dan Bahasa) Bekasi, sebagai berikut:

- (1) Peningkatan payung hukum muatan lokal
- (2) Peningkatan kebijakan alokasi anggaran pengembangan mulok
- (3) Optimalisasi kebijakan kompetensi tenaga pengajar mulok
- (4) Peningkatan aksesibilitas *informan* dan komunikasi pengembangan mulok
- (5) Peningkatan kapasitas kelembagaan sebagai pendukung mulok
- (6) Peningkatan pendampingan pembinaan kompetensi pengajar mulok
- (7) Peningkatan kapasitas materi media dan bahan ajar
- (8) Peningkatan partisipasi masyarakat, Du/Di dalam pengembangan mulok

Inovasi tersebut akan dihasilkan melalui matriks strategi melalui iterasi antara komponen Peluang dan Kelemahan. Hasil selengkapnya matrik strategi dan Kebijakan penerapan muatan lokal (Sejarah,

Tabel 3.  
Matrik Strategi Dan Kebijakan Penerapan Muatan Lokal (Sejarah, Budaya, Dan Bahasa) Bekasi

N O	STRATE GI	KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KEBERHASILA N	KEGIATAN PENGEMBA NGAN MULOK
1	Peningkat	Regulasi	• Penetapan	• Adanya	• Peraturan

NO	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KEBERHASILAN	KEGIATAN PENGEMBANGAN MULO
1	an payung hukum muatan lokal	pemda terhadap kebijakan muatan lokal	Peraturan Daerah Tentang Penerapan Muatan Lokal Sejarah, Budaya, dan Bahasa Bekasi di Tingkat Sekolah SD dan SMP di Kota Bekasi	naskah akademik <ul style="list-style-type: none"> <li>• Usulan dari kelompok masyarakat dan dinas terkait</li> <li>• Hak inisiatif dewan</li> </ul>	Walikota/Peraturan daerah <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sosialisasi kebijakan penerapan Mulok</li> <li>• Kebijakan uji coba penerapan mulok tahap I tingkat SD dan SMP</li> <li>• Kebijakan Penerapan Tahap II: seluruh sekolah di Kota Bekasi</li> </ul>
2	Peningkatan kebijakan alokasi anggaran pengembangan mulok	Relokasi anggaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penentuan Alokasi Anggaran Pendukung Penerapan Muatan Lokal Sejarah, Budaya, dan Bahasa Bekasi di Tingkat Sekolah SD dan SMP di Kota Bekasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya identifikasi kebutuhan anggaran kegiatan</li> <li>• Usulan dalam KUA/PPAS, APBD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Identifikasi kebutuhan anggaran Penerapan Muatan Lokal dan Aplikasinya</li> <li>• Penetapan Kebutuhan Anggaran Pengembangan dan Penerapan Muatan Lokal</li> <li>• Pelaksanaan Pengembangan Sarana dan Prasarana</li> </ul>

NO	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KEBERHASILAN	KEGIATAN PENGEMBA NGAN MULOK
					Pendukung Aplikasi Muatan Lokal • Pengembangan Museum • Pengembangan Perpustakaan Daerah • Anggaran Penerapan Tahap I • Anggaran Penerapan Tahap II • Evaluasi Efektivitas anggaran penerapan mulok
3	Optimalisasi kebijakan kompetensi tenaga pengajar mulok	Peningkatan kompetensi tenaga pengajar mulok	Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Pengajar Muatan Lokal Sejarah, Budaya, dan Bahasa Bekasi untuk Tingkat Sekolah SD dan Pendidikan Lingkungan Budaya Bekasi (PLBB) tingkat SMP di Kota Bekasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersertifikasinya guru dan kompetensi mulok</li> <li>• Sertifikasi lokal ditandatangani oleh Dinas Pendidikan dan Lembaga Independen (DKB atau lembaga Kebudayaan Bekasi lainnya).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Workshop kompetensi tenaga pengajar mulok</li> <li>• Pelatihan penyusunan kurikulum mulok</li> <li>• Pelatihan metode mengajar mulok</li> <li>• Sertifikasi khusus guru kompetensi mulok yang diketahui dinas pendidikan</li> </ul>

NO	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KEBERHASILAN	KEGIATAN PENGEMBA NGAN MULOK
					<p>dan Dewan Kesenian Bekasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembentukan Tim independen sertifikasi mulok</li> </ul>
4	Peningkatan aksesibilitas informan dan komunikasi pengembangan mulok	Peningkatan akses data informasi pengembangan mulok	Program Reengineering Materi Pendukung Muatan Lokal.	Adanya media informasi (buku, booklet, bulletin, website, CD, DVD, panduan dan wisatawan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan buku panduan wisata dan budaya bagi pelajar</li> <li>• Pengembangan program program <i>city tour</i> sejarah budaya dan bahasa</li> <li>• Pekan seni budaya pelajar Kota Bekasi/lomba-lomba seni budaya pelajar secara berkala</li> </ul>
5	Peningkatan kapasitas kelembagaan sebagai pendukung mulok	Optimalisasi kelembagaan pendukung mulok	Program Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Pendukung Muatan Lokal	Adanya program koordinasi rutin dengan lembaga/ organisasi pendukung mulok	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kapasitas kelembagaan pendukung mulok</li> <li>• Peningkatan fasilitas bantuan peralatan penunjang mulok</li> </ul>

NO	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KEBERHASILAN	KEGIATAN PENGEMBANGAN MULO
					<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemberian penghargaan bagi lembaga pelopor dan Pembina</li> </ul>
6	Peningkatan pendampingan pembinaan kompetensi pengajar mulok	Peningkatan kapasitas <i>skill</i> kompetensi pengajar mulok  Peningkatan sarana dan prasarana aktivitas pengajaran mulok	Program Peningkatan Infrastruktur pendukung Muatan Lokal	Adanya pelatihan rutin dan berkala  Peningkatan kuantitas sarana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Identifikasi kebutuhan sarana dan prasarana pendukung mulok</li> <li>• Pengembangan sentra-sentra wisata sejarah, budaya dan bahasa Bekasi. (sanggar, situs, dan perpustakaan daerah) yang dikelola secara entertainment dan profesional</li> <li>• Pelatihan kualitas pengajar mulok</li> </ul>
7	Peningkatan kapasitas materi media dan	optimalisasi materi media bahasan pengajaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan Kapasitas Media Ajar Muatan Lokal di</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersusunnya silabus RPP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembentukan tim penyusun bahan penjaran</li> </ul>

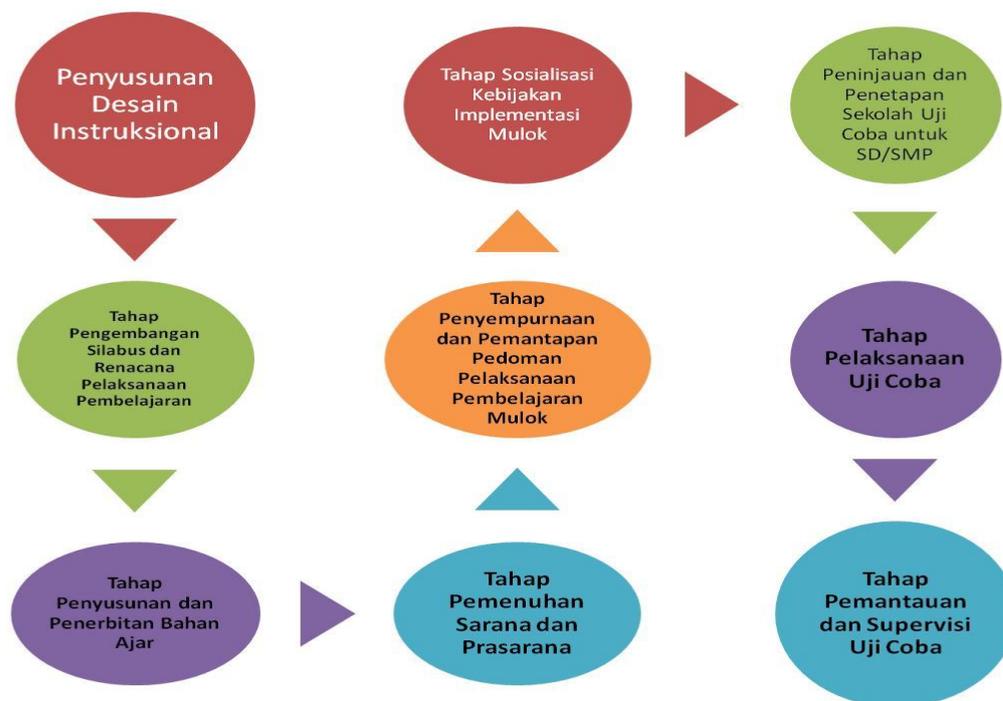
NO	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KEBERHASILAN	KEGIATAN PENGEMBANGAN MULO
	bahan ajar		Kota Bekasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersusunnya bahan pengajaran SD/SMP standar BSNP dan ISBN</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>mulok</li> <li>• Penyusunan bahan ajar mulok</li> <li>• Sosialisasi bahan ajar mulok bagi tenaga pengajar</li> <li>• Pengadaan Pencetakan Buku Ajar</li> <li>• Distribusi bahan ajar</li> </ul>
8	Peningkatan partisipasi masyarakat, Du/Di dalam pengembangan mulok	Optimalisasi peran serta masyarakat Du/Di pengembangan mulok	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha/Industri dalam pengembangan Muatan Lokal di Kota Bekasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya Mou Pemerintah dengan dunia usaha /industri</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Identifikasi peran serta masyarakat, Du/Di dalam pengajaran mulok</li> <li>• Peningkatan kontribusi Du/Di dalam pengembangan mulok</li> <li>• Pengembangan dana CSR bagi pengembangan Mulok</li> </ul>

### **Tahapan Implementasi**

Hasil studi kebijakan penerapan Bahasa, Budaya dan Sejarah Bekasi sebagai muatan lokal di sekolah dasar dan menengah di kota Bekasi ini, maka langkah selanjutnya adalah implementasi muatan lokal, meliputi:

1. Tahapan Penyusunan Disain Instruksional
2. Tahap Pengembangan Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
3. Tahap Penyusunan dan penerbitan bahan ajar
4. Tahap sosialisasi kebijakan implementasi Mulok
5. Tahap peninjauan dan penetapan sekolah uji coba untuk SD dan SMP/MI
6. Tahap pelaksanaan uji coba
7. Tahap pemantauan dan supevisi uji coba
8. Tahap penyempurnaan dan pemantapan pedoman pelaksanaan pembelajaran mulok
9. Tahap pemenuhan sarana prasarana

Gambar 3.  
Tahapan Implementasi Penerapan Muatan Lokal  
Sejarah, Budaya, dan Bahasa di Kota Bekasi



## KESIMPULAN

Sebagai penutup, ada beberapa rekomendasi yang menjadi prasyarat bagi implementasi penerapan kurikulum muatan lokal di Kota Bekasi (Sejarah, Budaya, dan Bahasa Bekasi), di antaranya adalah:

1. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan penerapan kurikulum muatan lokal, prasyarat utama adalah adanya komitmen yang sangat besar dari pimpinan/kepala daerah (Walikota/Wakil Walikota Bekasi) dan seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi, dan seluruh *stakeholder* pendidikan di Kota Bekasi.
2. Komitmen tersebut perlu didukung dengan kebijakan (baik

Peraturan Daerah maupun Peraturan Walikota) dalam penerapan maupun dukungan alokasi anggaran yang berpihak bagi optimalisasi penerapan muatan lokal di Kota Bekasi.

3. Tahap yang paling utama dilakukan adalah mulai melakukan pembentukan tim penyusun bahan ajar muatan lokal untuk Sekolah Dasar (SD) maupun Sekolah Menengah Pertama (SMP); penyusunan bahan ajar dan distribusi bahan ajar.
4. Tahap Berikutnya adalah identifikasi kebutuhan penerapan muatan lokal baik di tingkat SD maupun SMP (aspek tenaga pengajar, anggaran, sarana dan prasarana pendukung, target

tahap I ujicoba, dan tahap berikutnya) termasuk sekolah yang menjadi sasaran ujicoba tahap I dan berikutnya. Usulan diawali ujicoba dimulai dari *pilot project* pada setiap kecamatan.

5. Dinas pendidikan dan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Kepariwisata merupakan dinas utama bagi penyelenggaraan dan penerapan implemenntasi Muatan Lokal (Sejarah, Budaya dan Bahasa Bekasi). Oleh karena itu, konsekuensi dari ujung tombak pelaksanaan kegiatan tersebut, maka direkomendasi pada kedua dinas/SKPD tersebut mendapatkan prioritas anggaran dalam APBD/ABT sesuai dengan tahapan yang telah direkomendasikan dalam kajian ini sebagai naskah akademik juga sebagai acuan tahapan pelaksanaan implemenntasi penerapan muatan lokal di Kota Bekasi.
6. Oleh karena itu, Dewan Pendidikan, DPRD Kota Bekasi, Dewan Kesenian Bekasi, IKASENTRA, Perguruan Tinggi dan *stakeholder* lainnya menjadi pengawal dan melakukan evaluasi efektivitas tahapan implementasi penerapan muatan lokal di Kota Bekasi secara *sustainable* (berkelanjutan) dan berkala.
7. Implementasi penerapan muatan lokal juga perlu mendapatkan pelayanan sarana-prasarana pendukung di antaranya museum daerah, program *city tour*, perpustakaan daerah yang

memadai, pembinaan sanggar-sanggar seni budaya dan aspek lainnya yang lebih memadai.

8. Pada bagian akhir, rekomendasi ini diharapkan agar secara keseluruhan upaya penerapan muatan lokal dilaksanakan dengan mengacu pada pentahapan yang dilakukan secara tertib dan sistematis sehingga diharapkan agar pelaksanaan penerapan muatan lokal lebih optimal dan sesuai dengan yang diharapkan oleh seluruh masyarakat dan pemerintah kota Bekasi

## DAFTAR PUSTAKA

- Abd.Gafar, Irfan, Jamil B, Muhammad. 2003. *Re-Formulasi Rancangan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: Nur Insani,
- Atwi,Suparman. 2004. *Desain Instruksional*. Jakarta: Pusat Penerbitan Universitas Terbuka
- Arifin. 2000. *Bagaimana Menjadi Guru Profesional ?* Jakarta: Rajawali
- Arsyad, Azhar. 1998. *Pengembangan Media Pembelajaran*. Ciputat: Logos Wacana Ilmu
- Bruner, Jerome. 1996. *Menjadikan siswa aktif (Terj)*. Jakarta: Media Komputindo
- Bogdan, Robert C and Sar Knopp Billen. 1982. *Qualitative*

- Research for Education to Theori and Methods* (London : Allyn and Bacon Inc
- Djaafar, Tengku Zahara. 2001. *Konstrubusi Strategi Pembelajaran Terhadap Hasil Belajar*. Padang: Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang
- Departemen Agama RI. 2003. *Memahami Paradigma Baru Pendidikan Nasional dalam Undang-undang SISDIKNAS*. Jakarta: Dirjen Kelembagaan Agama Islam
- E. Mulyasa. 2007. *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan; suatu panduan praktis*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Gulo. 2005. *Aktivasi Dalam Proses Pembelajaran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Johnson & Johnson. 1991. *Pengembangan Pengetahuan, Keterampilan dan Sikap Secara Aktif*. Jakarta: Gramedia Widiasarana
- Rusyan, Tabrani et al. 1986. *Berbagai Pendekatan Dalam PBM*. Bandung: Remaja Rosda Karya
- Sardiman. 1989. *Konseptualisasi Pembelajaran Tersistem*. Jakarta: Bumi Aksara
- Mulyasa, E. 2003. *Pembelajaran Portofolio*. Bandung: Remaja Rosda Karya
- Miarso, Yushupadi. 1990. *Teknologi Pembelajaran Di Sekolah*. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Miarso, Yusufhadi. 2004. *Menyemai Benih Teknologi Pendidikan*. Jakarta: Prenada Media
- Morris, Barbara. 2002. *Learning in Elementary and Early Childhood Education*. Columbia: University of Missouri
- Muhajir. 2000. *Bahasa Betawi; Sejarah dan Perkembangannya (Rujukan Bahan Muatan Lokal di Sekolah)*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Nawawi, Hadari. 2004. *Administrasi Pembelajaran*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- L. Silberman, Malvin. 2006. *Effectiveness Instructiona..* Boston: Prehallind
- Purwanto, Ngalim. 1986. *Psikologi Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakaya
- Soetopo, Hendyat. 2000. *Kecakapan Dalam Proses Relajar Mengajar*. Jakarta: Bumi Aksara
- Semiawan, Conny. 1991. *Peran Guru Dalam Pengembangan Pembelajaran Proses*. Jakarta: UI Press

Stiles dan Horsley. 1998. *Beyond Teaching and Learning, Memadukan Quantum Teaching and Learning*. Jakarta: Nuansa

Sudirdjo, Sudarsono dan Evelina Siregar dalam Dewi Salma Prawiradilaga. 2004. *Mozaik Teknologi Pendidikan*. Jakarta: Universitas Negeri Jakarta

Tideman, J. 1974. “*Tanah dan Penduduk di Indonesia; Penduduk Kabupaten Batavia, Meester Cornelis, dan Buitenzorg*”. Terjemahan Hasan Basri. Jakarta: Bhratara

### **Sumber lainnya**

UU RI Nomor 20 Tahun 2003, *Sistem Pendidikan Nasional*, Jakarta, 2003

UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah

UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

PP No. 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

Permendiknas No. 22/2006 tentang Standar Isi (SI)

Permendiknas No. 23/2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan (SKL)

Permendiknas No. 24/2006 tentang Pelaksanaan SI dan SKL

Permendiknas No. 6/2007 tentang Perubahan Permendiknas No. 24/2006

Permendiknas No. 19/2007 tentang Standar Pengelolaan

Permendiknas No. 20/2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan

Permendiknas No. 24/2007 tentang Standar Sarana Prasarana

Permendiknas No. 41/2007 tentang Standar Proses

Perda Nomor 5 Tahun 2003 tentang 5 tahun 2003 tentang Pemeliharaan Bahasa, Sastra dan Aksara Daerah Provinsi Jawa Barat

Perda Propinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang RPJP D Jawa Barat

Renstra Pendidikan Nasional 2010-2025 RPJMD Kota Bekasi 2008-2013

